

ISSBN :
NO . 35543.96.04

POTENSI DESA INTI (PODES INTI)
JAWA TIMUR 1995

Angka Sementara

KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR

<https://tim.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pengumpulan data potensi desa dilakukan oleh Biro Pusat Statistik setiap ada kegiatan sensus, baik pada sensus penduduk, sensus pertanian maupun sensus ekonomi. Namun untuk pengumpulan data potensi desa inti (PODES INTI) baru dilaksanakan dua kali yakni pada tahun 1994 dan tahun 1995. Pada dasarnya keterangan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun hampir sama. Selain data penduduk, data yang dikumpulkan juga mengenai perhubungan, pertanian, komunikasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan hiburan, serta prasarana ekonomi dan masalah lingkungan hidup.

Publikasi ini dapat disajikan pada masyarakat, khususnya pada pemakai data, tiada lain berkat kerja payah dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari para aparat desa/kelurahan di seluruh Jawa Timur yang telah menyelesaikan pengisian daftar Podes Inti 1995, sesuai dengan petunjuk dan aduan yang telah ditentukan. Untuk itu semua tak lupa kami sampaikan terima kasih.

Kami akui bahwa publikasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran demi perbaikan publikasi-publikasi kami yang akan datang sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Surabaya, Maret 1996
KANTOR STATISTIK PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala,



SOEWONDO HARDJOPAWIRO, MSc.

NIP. 340000718

PELAYANAN STATISTIK TERPADU KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA TIMUR	
NO. REGISTRASI	
PROVINSI	JAWA TIMUR
KESEMPILAN KE	

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	iii
1.1 Latar Belakang	iii
1.2 Tujuan	iv
1.3 Batasan Masalah	iv
BAB II METODOLOGI	v
2.1 Sumber Data	v
2.2 Metode Penghitungan	v
2.3 Konsep dan Definisi	vi
BAB III ULOASAN	xiii
3.1 Keterangan Umum Desa/Kelurahan	xiii
3.2 Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Perumahan	xvii
3.3 Pendidikan	xxi
3.4 Sosial Budaya	xxiii
3.5 Kesehatan	xxv
3.6 Angkutan dan Komunikasi	xxvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1 - 129

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Data mengenai jumlah penduduk miskin dan lokasi desa miskin sangat diperlukan oleh pemerintah terutama untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan data mengenai desa miskin atau yang dikenal dengan sebutan desa tertinggal memberikan informasi mengenai wilayah-wilayah dimana kebanyakan penduduknya masih tergolong miskin.

Program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan telah dimulai sejak akhir Pelita IV. Program ini berlanjut terus dalam Pelita VI yang ditargetkan tidak hanya ditujukan kepada penduduk miskin di desa tertinggal saja, melainkan termasuk juga desa tidak tertinggal. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah pemberian dana yang dituangkan dalam bentuk Inpres Desa Tertinggal (IDT) kepada penduduk miskin. Pemberian dana tersebut oleh pemerintah rencananya diberikan tiga kali, dengan pemberian pertama kali dimulai tahun 1994/1995, kemudian tahun 1995/1996 dan yang terakhir tahun 1996/1997.

Sampai dengan saat ini pemberian bantuan pemerintah kepada penduduk miskin sudah berjalan dua kali, yaitu pada tahun 1994/1995 dan 1995/1996. Namun pada kenyataannya bantuan tersebut belum dirasakan oleh semua penduduk miskin. Hal ini mungkin dikarenakan adanya beberapa kendala yang salah satunya adalah kurangnya kemampuan mandiri pokmas untuk mengurus atau mencairkan dana bantuan tersebut serta kurang mampu menyeimbangkan usaha bersama.

1.2 Tujuan.

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui sudah berapa banyak desa-desa di Jawa Timur khususnya desa tertinggal yang telah menerima bantuan dana IDT serta potensi dan fasilitas-fasilitas apa saja yang dimiliki desa-desa tersebut.

1.3 Batasan Masalah.

Untuk uraian lebih rincinya mengenai status hukum desa dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh desa, dalam tulisan ini dipisahkan antara desa tertinggal dan desa tidak tertinggal.

Pada umumnya pengertian desa tertinggal adalah desa yang masuk kategori desa miskin, namun dalam tulisan ini yang dimaksud desa tertinggal hanya terbatas pada desa-desa yang pada tahun 1995/1996 menerima bantuan IDT. Selain daripada itu yang dimaksud bantuan IDT yaitu bantuan baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data.

Sumber data utama dalam tulisan ini adalah angka sementara dari hasil pengolahan pencacahan Podes inti keadaan bulan Juni 1995. Dalam kuesioner Podes Inti 1995 ini ada beberapa hal baru yakni adanya tambahan maupun perubahan pertanyaan, antara lain mengenai status hukum desa, nama dan kode desa, memperoleh IDT, rumah kumuh, luas baku dan wajib pajak.

2.2 Metode Penghitungan.

Metode penghitungan penentuan suatu desa masuk dalam kategori desa miskin atau tidak miskin didasarkan pada skor desa. Sedangkan skor desa diperoleh dengan memberi nilai pada :

- Kelompok variabel potensi dan fasilitas desa
- Variabel fasilitas perumahan dan lingkungan
- Variabel keadaan penduduk

Skor Desa terdapat tiga jenis, pada tahun 1990 dibuat skor desa dengan 29 variabel rural dan 27 variabel urban. Pada tahun 1993 dibentuk skor desa melalui 27 variabel rural dan 25 variabel urban. Sedangkan untuk tahun 1994 penghitungan skor desa disempurnakan dengan lebih berorientasi pada kondisi penduduk guna memperoleh kemiskinan absolut, dengan skor desa dihitung berdasarkan 18 variabel rural dan 17 variabel urban. Dengan menggunakan variabel tersebut kemudian diklasifikasikan apakah sebuah desa tergolong miskin atau tidak miskin.

2.3 Konsep dan Definisi.

- Desa definitif : desa yang telah memiliki SK Mendagri sebelum Juli 1995
- Desa definitif baru : desa yang memiliki SK Mendagri sesuai penetapan Juli 1995
- Desa persiapan : desa yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur
- Desa/kelurahan : suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk UPT/PMST, sedangkan kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Klasifikasi desa swadaya (tradisional), swakarya (transisional) dan swasembada (berkembang) didasarkan:

1. Kemampuan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga desa/kelurahan.
2. Tingkat kemajuan administrasi.
3. Tingkat berfungsinya LKMD dalam mengorganisasikan pembangunan desa.

Klasifikasi desa/kelurahan telah ditentukan Dirjen Bangdes. Luas wilayah desa/kelurahan dalam Ha. Menurut keadaan pada saat pencacahan (tidak termasuk hutan negara). Lahan rakyat yang disewakan HPH/perhutani dimasukkan sebagai luas wilayah desa/kelurahan.

Kantor Pemerintahan de-: bangunan khusus untuk kantor desa/kelurahan/balai desa yang penggunaannya desa/kelurahan/balai desa tetap. Rumah kepala desa yang berfungsi kantor tidak dianggap sebagai kantor desa/kelurahan. Kantor desa/kelurahan yang rusak tetap dianggap sebagai kantor desa/kelurahan.

LKMD : lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang madukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan pertahanan keamanan.

LKMD persiapan : sedang dilakukan persiapan pembentukan LKMD.

LKMD kategori 1 : telah tumbuh pengertian dan kesadaran LKMD, telah dilangsungkan rapat pembentuktan LKMD, struktur organisasi sesuai dengan keputusan Mendagri No.25 tahun 1980, memiliki cap dan papan nama LKMD, masih memerlukan bimbingan dan bantuan pemerintah.

LKMD kategori 2 : mampu menyusun dan melaksanakan program kerja program PKK, memanfaatkan dana bantuan desa, dapat menggerakkan swadaya gotong royong.

LKMD kategori 3 : mampu menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan potensi setempat, sumber dananya tetap, administrasi dan laporannya tertib, seksi-seksinya berfungsi (minimal 3 seksi).

Kelahiran/Kematian : banyaknya kelahiran/kematian aktual yang terjadi di desa itu dan dilaporkan. Kematian bayi (< 1 thn): banyaknya kematian bayi yang terjadi selama setahun yang lalu dari saat pencacahan.

Lingkungan kumuh adalah lingkungan yang ditandai oleh :

- (1). banyak rumah kumuh.
- (2). saluran pembuangan limbah cairnya tidak lancar/macet.
- (3). kepadatan penduduk (bangunan rumah) di lingkungan tersebut tinggi.
- (4). berlokasi ditepi sungai/kali, rel kereta api dan gang-gang sempit.
- (5). keadaan MCK masih buruk (tidak menggunakan septictank, atau hanya menggunakan sungai/kali).

Apabila tiga (3) atau lebih tanda tersebut ada, maka wilayah tersebut dianggap kumuh.

Sekolah : lembaga pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Termasuk juga taman kanak-kanak.

Kegiatan sosial : kegiatan yang masih aktif yang bertujuan membina bidang sosial tertentu. Apabila di desa/kelurahan ada kelompoknya tetapi tidak aktif maka dianggap tidak ada. Suatu desa/kelurahan dikatakan memiliki suatu jenis organisasi sosial apabila kegiatan organisasi atau cabangnya berada di desa/kelurahan tersebut.

Kelompok Tani : perkumpulan petani yang melaksanakan intensifikasi dalam ikatan kerja sama usaha dan pengembangan pertanian.

Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa siaran pedesaan baik melalui sarana komunikasi radio, televisi maupun publikasi majalah atau surat kabar.

Usaha Kesejahteraan Sosial : perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) : kelompok kegiatan ekonomi bersama untuk kepentingan anggota yang timbul dari masyarakat yang belum mempunyai badan hukum. Biasanya merupakan cikal bakal KUD.

Lapangan/fasilitas olah raga yang ada di desa/kelurahan sesuai dengan persyaratan an olah raga yang bersangkutan.

Disuatu tempat tertentu bisa saja terdapat lebih dari satu macam fasilitas, baik berdampingan maupun umpang tindih asal masing-masing memenuhi syarat.

Kelompok kegiatan olah : Kelompok penduduk desa/kelurahan yang melakukan olah raga bersama, tanpa memperhatikan apakah olah raga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain.

Tempat pertunjukan : tempat tetap yang khusus digunakan untuk pertunjukan kesenian.

Perkumpulan kesenian : perkumpulan yang mengadakan latihan secara teratur dan siap untuk naik pentas baik di tempat sendiri maupun memenuhi panggilan.

Rumah Sakit Bersalin/ : rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak dibawah pengawasan dokter dan bidan/tenaga medis.

Rumah Bersalin : rumah yang dilengkapi fasilitas untuk melahirkan, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan ibu dan anak di bawah pengawasan bidan/tenaga medis.

Poliklinik : tempat pemeriksaan kesehatan yang biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada dibawah pengawasan dokter/tenaga medis. Tidak termasuk klinik yang terdapat di Puskesmas/Rumah Sakit. Poliklinik yang menyediakan tempat perawatan menginap, tetap digolongkan kedalam poliklinik.

puskesmas/Puskesmas : tempat pemeriksaan kesehatan ditingkat kecamatan atau desa/kelurahan yang membantu asanya dikepalai oleh seorang dokter/tenaga medis. Puskesmas Pembantu tidak setiap hari menyediakan tenaga dokter. Tidak termasuk dalam kategori ini puskesmas keliling.

tempat praktek dokter : suatu tempat khusus dimana dokter secara sendiri/bersama melakukan praktek pribadi melayani masalah kesehatan anggota masyarakat.

dokter yang dicakup : semua dokter, seperti dokter umum, dokter THT, kecuali dokter hewan.

paramedis : mantri kesehatan/perawat/bidan dan petugas kesehatan setingkat yang dapat memberikan pengobatan baik yang buka praktek maupun tidak.

bidan desa : tenaga paramedis yang pekerjaan utamanya membantu/menolong wanita melahirkan.

anakun bayi : orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sampingan maupun utama.

jalan utama : jalan darat yang menghubungkan desa/kelurahan bersangkutan dengan kecamatan atau dengan desa/kelurahan lain yang paling sering dilalui oleh penduduk. Hubungan darat jalan utama lainnya adalah jalan yang terbuat dari kayu/papan terletak di atas rawa-rawa.

angkutan umum : angkutan umum yang dapat digunakan oleh penduduk baik dalam desa/kelurahan maupun antar desa/kelurahan. Dalam hal ini yang dicakup adalah angkutan umum antar desa.

pasar dengan bangunan : pasar lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu, atap seng atau genteng atau sirap, baik berdingding/tidak, tanpa melihat ramai/tidak.

bertokoan : sejumlah toko terdiri dari paling sedikit 10 toko. Dalam satu pertokoan, bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

<https://jatim.bps.go.id>

BAB III U L A S A N

Berdasarkan hasil perhitungan desa miskin, diketahui bahwa pada tahun 1995 banyaknya desa yang masuk dalam kategori miskin 2.048 desa atau sekitar 24 persen dari jumlah desa yang ada di Propinsi Jawa Timur.

Pada tabel 1 terlihat bahwa dari desa miskin tersebut di atas, sekitar 2.022 desa sudah pernah mendapatkan bantuan IDT, 1.959 desa mendapat bantuan IDT tahun 1994/1995, 1.592 desa mendapat bantuan tahun 1995/1996. Sedangkan untuk desa yang belum pernah mendapat bantuan sebanyak 26 desa.

Dari 1.592 desa miskin yang mendapat bantuan tahun 1995/1996, ada 1.529 desa sudah pernah mendapat bantuan yaitu pada tahun 1994/1995. Dan sisanya (63 desa) baru mendapat bantuan tahun 1995/1996 saja. Jika dilihat menurut daerah perkotaan dan pedesaan, nampak bahwa bantuan IDT 1995/1996 diterima oleh 178 desa kota dan 1.414 desa pedesaan.

.1 Keterangan Umum Desa/Kelurahan.

Pada tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar desa/kelurahan di Jawa Timur berstatus hukum desa definitif yaitu 8.392 desa (99,58 persen), desa persiapan 32 desa (0,38 persen) dan desa definitif baru 3 desa (0,04 persen). Untuk desa definitif baru 2 desa berada di Kabupaten Jember dan sisanya 1 desa di Kabupaten Banyuwangi. Desa-desa yang berstatus definitif untuk golongan desa tidak tertinggal sebesar 99 persen, sedangkan untuk golongan desa tertinggal sekitar 1.585 desa atau 99 persen dari jumlah desa tertinggal.

Pada umumnya sebuah desa yang berstatus Desa, kepala desanya dipilih berdasarkan pemilihan rakyat/masyarakat setempat. Sedangkan yang berstatus Kelurahan, kepala desanya adalah karyawan pemerintah daerah yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan kepanjangannya. Tahun 1995 di Propinsi Jawa Timur untuk golongan desa tertinggal yang berstatus Kelurahan ada 17 Desa, dimana 14 desa merupakan daerah perkotaan dan 3 desa merupakan daerah pedesaan. Namun bila dilihat dari seluruh jumlah desa yang ada di Jawa Timur, baik yang masuk kategori tertinggal maupun tidak tertinggal, 8 persen (676 desa) adalah Kelurahan dan 92 persen (7.751 desa) berstatus Desa yang terdiri dari 685 desa perkotaan, 7.066 desa pedesaan.

Klasifikasi desa merupakan gambaran kemandirian sebuah desa di dalam kemampuannya menyelenggarakan urusan rumahtangga desa, tingkat kemajuan administrasi dan tingkat berfungsinya LKMD dalam mengorganisasikan pembangunan desa. Dari 8.427 desa di Jawa Timur, 98,92 persen mempunyai klasifikasi desa swasembada, 0,84 persen desa swakarya, 0,24 persen adalah desa swadaya. Hal tersebut sudah menunjukkan kemajuan apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1993 dimana untuk desa swasembada 98,08 persen, desa swakarya 1,38 persen dan desa swadaya 0,54 persen.

Jika dilihat per daerah tingkat II, sekitar 26 daerah tingkat II seluruh desanya telah mempunyai klasifikasi desa swasembada. Sedangkan sisanya mempunyai persentase antara 91-99 persen. Untuk daerah tingkat II yang persentasenya di bawah 95 persen adalah Kabupaten Sampang (91,94 persen), Kabupaten Probolinggo (93,94 persen) dan Kabupaten Malang (94,34 persen).

Kantor kecamatan umumnya berada di ibukota kecamatan. Sedangkan ibukota kecamatan biasanya lebih maju daripada desa-desa lain dalam kecamatan yang bersangkutan. Misalnya di ibukota kecamatan terdapat rumah sakit, puskesmas, kantor pos dan sebagainya. Kemudahan pencapaian penduduk suatu desa menuju ke kantor kecamatan terdekat berarti makin banyak akses dan frekuensi penggunaan fasilitas-fasilitas ibukota kecamatan yang dapat mempengaruhi kemajuan masyarakat desa tersebut.

Jawa Timur yang mempunyai jumlah desa terbanyak dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia, 6 persennya tergolong sulit apabila menuju ke kantor kecamatan terdekat. Dari jumlah desa tersebut 293 desa masuk kategori desa tertinggal dan 221 desa adalah desa tidak tertinggal. Sedangkan yang tergolong mudah untuk menuju ke kantor kecamatan ada sekitar 5.813 desa dimana 1.187 desa ada di daerah perkotaan, 4.626 desa di pedesaan.

Keberadaan kantor desa/kelurahan dan balai desa/kelurahan sangat besar manfaatnya bagi suatu desa. Dengan adanya kantor desa/kelurahan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa/kelurahan akan berjalan lebih tertib dan lancar. Begitu pula dengan adanya balai desa, kegiatan yang berhubungan untuk kemajuan desa dapat terselenggara dengan lancar, seperti kegiatan-kegiatan PKK dan sebagainya.

Telah disebutkan di muka bahwa 1.592 desa tertinggal di Jawa Timur telah mendapatkan bantuan T tahun 1995/1996. Dari desa-desa tersebut 1.487 desa sudah mempunyai kantor pemerintahan desa/kelurahan serta 1406 desa mempunyai balai desa/kelurahan.

Namun apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terlihat perbedaan yang cukup berarti. Untuk desa tertinggal kota 99 persen sudah mempunyai kantor desa, dan desa pedesaan sebesar 93 persen. Begitu pula untuk balai desa/kelurahan, desa tertinggal kota sekitar 92 persen sudah mempunyai balai desa/kelurahan, sedang desa pedesaan hanya 88 persen.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau yang lebih dikenal dengan sebutan LKMD, berfungsi membantu kepala desa/kelurahan di bidang perencanaan pembangunan berbagai fasilitas dan pengembangan potensi desa. LKMD yang telah mampu menyusun dan melaksanakan program kerja, mampu menggali sumber dana dan mengerahkan swadaya masyarakat tentu mempunyai kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Jawa Timur hanya 35 persen dari seluruh desa tertinggal yang LKMD-nya mempunyai tipe kategori 3, 63 persen tipe kategori 2 dan hanya 2 persen yang bertipe kategori 1. Antara daerah kota dan pedesaan terdapat perbedaan yang cukup berarti. Persentase desa tertinggal kota yang LKMD-nya tipe kategori 3 (61 persen), persentase pedesaan jauh lebih rendah yaitu 31 persen.

Penghidupan pada masyarakat tradisional dan miskin pada umumnya masih sangat tergantung kepada sektor pertanian. Semakin maju suatu masyarakat, peranan sektor pertanian semakin kecil. Sejalan dengan itu peranan sektor industri/kerajinan dan perdagangan/jasa semakin besar. Lebih dari 95 persen desa tertinggal pedesaan di setiap daerah tingkat II, penduduknya berusaha di sektor pertanian. Demikian pula halnya di daerah kota ternyata sektor pertanian masih merupakan suatu mata pencaharian

yang utama bagi penduduk di desa tertinggal kecuali untuk Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik justru sektor industri yang memegang peranan (lihat tabel 4b).

3.2 Kependudukan, Lingkungan Hidup dan Perumahan.

Propinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah sebesar 34.801,560 km², secara administratif dibagi menjadi 37 daerah tingkat II terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kotamadia. Dari daerah tingkat II di atas, Kabupaten Malang mempunyai wilayah paling luas yaitu 7 persen dari luas Jawa Timur sedangkan wilayah terkecil dimiliki oleh Kotamadia Mojokerto (0,05 persen).

Hasil pencacahan Podes Inti 1995 menunjukkan bahwa penduduk Jawa Timur berjumlah 32.625.406 jiwa. Sekitar 7 persen dari jumlah penduduk Jawa Timur tinggal di Kotamadia Surabaya. Ini memperlihatkan persentase terbesar apabila dibandingkan dengan kabupaten/kotamadia lain, dan persentase terkecil adalah Kotamadia Mojokerto (0,32 persen).

Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi keadaan lingkungan pemukiman yang dapat menumbuhkan sifat kumuh dan kondisi perumahan yang sulit ditata selayaknya untuk menjamin sanitasi yang sehat. Sebaliknya, desa yang penduduknya masih jarang, bisa mencerminkan bahwa desa tersebut terpencil atau kurang maju.

Angka kepadatan penduduk diperoleh dari banyaknya penduduk di suatu daerah dibagi dengan luas wilayah daerah yang bersangkutan. Dari tabel 4A didapat bahwa hampir semua kabupaten/kotamadia di Jawa Timur mempunyai kepadatan penduduk ≥ 500 penduduk/km². Hanya Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Sumenep saja yang mempunyai kepadatan < 500 , masing-masing sebesar 392 dan 489 penduduk/km².

Pada umumnya daerah kotamadia mempunyai tingkat kepadatan yang lebih tinggi daripada daerah kabupaten. Kotamadia Surabaya yang mempunyai luas wilayah 292,063 km² ternyata tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi (7.934 penduduk/km²) dibandingkan dengan kabupaten/kotamadia lain.

Dilihat dari dikotomi daerah yaitu kota dan pedesaan, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan di desa kota di semua daerah tingkat II selalu jauh lebih tinggi daripada pedesaan. Kepadatan di kota berkisar antar 1.500-10.500 penduduk/km², pedesaan antara 350-1.850 penduduk/km². Kepadatan tertinggi di kota berada di Kotamadia Surabaya, terendah di Kabupaten Blitar. Sedangkan kepadatan tertinggi di pedesaan ada di Kotamadia Mojokerto dan terendah Kabupaten Pacitan.

Apabila mendengar kata "kumuh", sering terbersit dibenak kita bahwa hal tersebut berkaitan erat sekali dengan wilayah yang sarat dengan bangunan-bangunan yang tidak memenuhi persyaratan rumah sehat dengan kondisi wilayah yang terkesan kotor. Wilayah kumuh yang dimaksud dalam podes inti adalah suatu desa dikatakan mempunyai wilayah kumuh, apabila di desa tersebut ada suatu wilayah yang minimum memenuhi 3 kriteria dibawah ini :

banyak rumah kumuh

saluran pembuangan limbah cairnya tidak lancar/macet

- kepadatan penduduk (banguna rumah) di lingkungan tersebut tinggi
- berlokasi ditepi sungai/kali, rel kereta api dan gang-gang sempit
- keadaan MCK masih buruk (tidak menggunakan septictank, atau hanya menggunakan sungai/kali).

Seringkali di daerah kota dijumpai wilayah-wilayah kumuh. Hal ini disebabkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akibat besarnya tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan tersebut umumnya diakibatkan beberapa faktor, salah satunya antara lain : keinginan untuk meningkatkan pendapatan dan merubah taraf hidup yang diharapkan lebih baik.

Pada tabel 4A terlihat bahwa di setiap kabupaten/kotamadia terdapat wilayah kumuh, kecuali Kabupaten Trenggalek, Kediri, Bondowoso, Magetan dan Bangkalan. Wilayah kumuh terluas ada di Kabupaten Sumenep dimana 32 desa mempunyai wilayah kumuh seluas 5.254,5 Ha. Kabupaten Lamongan adalah kabupaten yang paling banyak desanya yang mempunyai wilayah kumuh, dimana dari 475 desa terdapat 68 desa yang mempunyai wilayah kumuh walaupun luasnya masih dibawah Kabupaten Sumenep.

Di desa kota, sekitar 16 persen desa mempunyai wilayah kumuh. Sedangkan di Pedesaan relatif lebih rendah yaitu hanya 6 persen. Namun bila dipandang dari luas wilayahnya, ternyata wilayah kumuh di pedesaan lebih luas daripada di perkotaan, dimana 19.132,4 Ha untuk pedesaan dan perkotaan 2.626,1 Ha. Baik secara absolut maupun persentase ternyata wilayah kumuh di pedesaan tetap lebih tinggi daripada perkotaan, dimana untuk daerah pedesaan 9 persen dan perkotaan 6 persen dari luas desa yang mempunyai wilayah kumuh.

Besarnya angka tingkat kelahiran kasar (CBR) terhadap tiap 1.000 penduduk menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk desa setempat yang dapat mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk. Hal ini dapat mendorong timbulnya berbagai masalah kemiskinan karena makin banyaknya jiwa yang harus mendapat jatah pendapatan. Dilain pihak, tingkat kelahiran kasar yang tinggi cenderung tumbuh dalam kelompok penduduk yang miskin pengetahuan maupun ekonomi.

Dari tabel 4A diperoleh gambaran bahwa tingkat kelahiran kasar di Jawa Timur sebesar 11, artinya dari setiap 1.000 penduduk di Jawa Timur terjadi kelahiran/pertambahan penduduk secara alamiah sebesar 11 jiwa. Untuk desa tertinggal tingkat kelahiran kasar adalah 11, sedang desa tidak tertinggal juga memperlihatkan nilai yang sama.

Besar atau kecilnya tingkat kematian kasar dapat menunjukkan adanya faktor yang kurang menguntungkan kesehatan penduduk desa setempat. Tingginya tingkat kematian tiap 1.000 penduduk (CDR) menunjukkan kondisi kesehatan yang buruk karena himpitan kemiskinan ekonomi dan pengetahuan.

Di desa tertinggal, selama kurun waktu setahun yang lalu terjadi kematian penduduk sejumlah 4.002 jiwa, dimana 11 persen yang meninggal adalah bayi di bawah usia 1 tahun (IMR). Sedangkan untuk tingkat kematian kasar Jawa Timur diperoleh sebesar 5, ini berarti dari setiap 1.000 penduduk terjadi kematian sebanyak 5 jiwa. Untuk desa tidak tertinggal, angka tingkat kematian kasar besarnya sama dengan angka kematian kasar desa tertinggal. Namun untuk kematian bayi lebih banyak terjadi di desa tertinggal. Kematian bayi di desa tidak tertinggal sekitar 5 persen dari jumlah penduduk yang meninggal di desa tersebut selama setahun yang lalu.

Pada desa tertinggal kota mempunyai tingkat kematian kasar (CDR) lebih tinggi dari pedesaan, di kota 6 dan pedesaan 5. Dilain hal, untuk kematian bayi terjadi perbedaan yang cukup berarti antar kedua wilayah tersebut, di kota 6 persen dan pedesaan sebesar 12 persen.

3.3 Pendidikan.

Tingkat pendidikan penduduk mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat pendapatan. Keberadaan sekolah di desa memudahkan penduduknya untuk memperoleh pendidikan formal. Makin tinggi jenjang sekolah yang dimiliki desa, cenderung makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat sumberdaya manusia yang baik, sehingga pendapatan penduduknya cenderung lebih baik.

Dari seluruh desa di Jawa Timur, ada 26 desa yang tidak memiliki fasilitas pendidikan. Kabupaten Bangkalan memiliki persentase tertinggi (2,14 persen), sedang persentase terendah ada di Kabupaten Lamongan (0,21 persen). Kenyataan yang sungguh mengherankan ada di Kotamadia Surabaya (ibukota Propinsi Jawa Timur) yang terkenal sebagai kota metropolis ke dua di Indonesia. Di Kotamadia ini ternyata masih ada 1 desa yang tidak mempunyai fasilitas pendidikan, dan yang lebih mengherankan lagi desa tersebut justru berada di daerah perkotaan (tabel 5). Di kotamadia Kediri, seluruh desa yang berada di daerah pedesaan hanya mempunyai fasilitas pendidikan s/d tingkat SMTP, sedangkan di Kotamadia Mojokerto hanya s/d tingkat SD.



Salah satu program pemerintah di bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewajibkan setiap penduduk usia sekolah untuk menjalankan wajib belajar dasar 9 tahun (Yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1994) terutama untuk penduduk yang berumur 7-15 tahun.

Enrollment ratio penduduk usia (7-15 tahun) adalah perbandingan jumlah penduduk usia (7-15 tahun) yang masih sekolah terhadap jumlah seluruh penduduk (7-15 tahun). Makin tinggi ratio tersebut, maka dapat dikatakan semakin banyak penduduk usia sekolah yang dapat menikmati pendidikan. Keadaan ini bisa disebabkan karena dukungan ekonomi yang cukup bagi tiap rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah. Sebaliknya makin kecil ratio, dapat berarti adanya ketidakmampuan rumah tangga yang mempunyai anak usia sekolah untuk menyekolahkan anaknya.

Daerah-daerah tingkat II di Jawa Timur memiliki tingkat enrollment ratio antara 72-100 persen. Persentase tertinggi dimiliki oleh Kotamadia Madiun, persentase terendah adalah Kabupaten Sampang. Bila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terlihat bahwa hampir di semua daerah tingkat II persentasenya selalu lebih tinggi di daerah kota daripada pedesaan, ini berarti bahwa lebih banyak penduduk usia 7-15 tahun di daerah kota yang dapat menikmati pendidikan di sekolah daripada penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal di pedesaan. Daerah tingkat II yang mempunyai perbedaan > 15 persen antara kota dan pedesaan terjadi di Kabupaten Sumenep, Bangkalan dan Kotamadia Mojokerto.

.4 Sosial Budaya.

Pertumbuhan sosial budaya penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan ekonomi dan pendidikan yang dapat dijangkau. Semakin banyak kegiatan sosial budaya dilakukan oleh penduduk desa cenderung adanya kegairahan hidup yang didorong oleh kemampuan ekonomi dan pemilikan pengetahuan pada penduduk desa bersangkutan. Sebaliknya keadaan minimum dari kegiatan sosial budaya penduduk sering dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan dalam arti sosial maupun ekonomi. Penduduk mungkin tidak bisa melaksanakan kegiatan sosial karena keterbelakangan kemiskinan ekonomi.

Telah disebutkan di muka, bahwa pada umumnya sumber penghasilan penduduk terutama di desa miskin berasal dari sektor pertanian. Sarana kegiatan sosial terutama yang berkaitan dengan bidang pertanian sangat diperlukan oleh penduduk tersebut agar dapat menambah pengetahuan di bidang pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan.

Sekitar 74 persen desa tertinggal memiliki kelompok tani yang bertujuan melaksanakan intensifikasi dalam ikatan kerja sama usaha dan pengembangan pertanian. Kelompok tani tersebut banyak jumpai di kota (81 persen) daripada di pedesaan (74 persen). Begitu pula untuk kelompok capir, juga lebih banyak ditemui di desa tertinggal kota 58 persen, pedesaan hanya 38 persen. Untuk kegiatan sosial lainnya seperti usaha kesejahteraan sosial dan kelompok usaha bersama terjadi hal yang sama seperti di atas, dimana masing-masing mempunyai persentase 82 persen dan 40 persen untuk daerah kota, sedang daerah pedesaan 69 persen dan 24 persen (tabel 6A).

Selain dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh desa, suatu desa tertinggal digambarkan juga dengan banyaknya penduduk di desa tersebut yang tergolong miskin. Pada tabel 6A, untuk gambaran banyaknya penduduk miskin ditunjukkan melalui banyaknya rumahtangga yang memerlukan surat keterangan miskin. Dari sejumlah rumahtangga yang tinggal di desa tertinggal, persentase rumahtangga yang memerlukan surat keterangan miskin terbanyak terjadi di Kotamadia Madiun (16,65 persen), dan untuk Kotamadia Surabaya walaupun ada 1 desa yang tergolong tertinggal namun tidak ada rumahtangga di desa tersebut yang memerlukan surat keterangan miskin.

Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, adalah suatu semboyan yang berkaitan erat sekali dengan kegiatan olah raga. Tabel 6B menampilkan banyaknya desa yang memiliki fasilitas dan kegiatan olah raga. Fasilitas olah raga yang banyak dimiliki oleh desa-desa di Jawa Timur adalah fasilitas olah raga bola voli, urutan terbanyak ke dua tenis meja dan yang ke tiga adalah sepak bola. Namun sangat disayangkan, fasilitas-fasilitas yang ada tidak diikuti dengan adanya kegiatan olah raga di desa-desa tersebut. Dari 8.427 desa, hanya 7 desa yang memiliki kegiatan olah raga dimana ke 7 desa tersebut berada di Kotamadia Surabaya (2 desa), Kabupaten Malang (2 desa), Kabupaten Pamekasan (1 desa), Kotamadia Blitar (1 desa) dan Kotamadia Probolinggo (1 desa).

3.5 Kesehatan.

Kesejahteraan penduduk sangat ditentukan oleh kesehatannya. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan perlu tersedia di suatu desa. Makin baik dan lengkap fasilitas kesehatan di suatu desa, akan makin baik kesehatan masyarakatnya. Bila masyarakat desa terjamin kesehatannya, maka mereka lebih mungkin untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Lebih dari 40 persen desa miskin di Jawa Timur memiliki sarana kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu/pos pelayanan desa/balai pengobatan. Sedangkan yang memiliki rumah sakit/BKIA/rumah bersalin/poliklinik sebesar 18 persen, praktek dokter hanya 4 persen. Tak berbeda dengan di pedesaan, Desa-desa tertinggal di kotapun persentase terbesar sarana kesehatan yang dimiliki adalah puskesmas/puskesmas pembantu. Di kota, desa-desa tertinggal yang memiliki puskesmas persentasenya 54 persen, rumah sakit/BKIA 27 persen, praktek dokter 25 persen. Di daerah pedesaan persentasenya relatif lebih kecil, dimana puskesmas/puskesmas pembantu 41 persen, rumah sakit/BKIA 17 persen dan praktek dokter hanya 1 persen (tabel 7A).

Tenaga kesehatan yang tinggal di desa sangat penting bagi pelayanan kesehatan masyarakat desa setiap waktu dibutuhkan. Jenis tenaga kesehatan yang ada di desa turut menentukan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat setempat.

Dari semua tenaga kesehatan yang ada di desa tertinggal, persentase terbesar (66 persen) adalah dukun bayi, dan hanya sekitar 1 persen tenaga dokter ada di daerah tersebut. Begitu juga di masing-masing daerah tingkat II, dukun bayilah yang mempunyai persentase terbanyak, kecuali di Kabupaten

Sidoarjo, Kotamadia Kediri, Mojokerto dan Kotamadia Madiun justru tenaga paramedis yang paling dominan.

Di desa miskin/tertinggal pedesaan, tenaga kesehatan yang paling menonjol adalah dukun bayi (71 persen). Namun untuk desa miskin kota, tenaga paramedis yang mempunyai persentase terbesar (42 persen) dibandingkan dengan jumlah tenaga kesehatan yang lainnya.

Tak berbeda dengan desa tertinggal, desa-desa golongan tidak tertinggalpun pada umumnya tenaga kesehatan terbanyak adalah dukun bayi. Namun, antara daerah kota dan pedesaan terjadi perbedaan yang cukup berarti, dimana untuk daerah pedesaan dukun bayi tetap memegang peranan, di kota justru tenaga paramedis dan dokter yang memegang peranan.

Gambaran selengkapnya mengenai karakteristik ini dapat di lihat pada tabel 7B.

Sumber air minum merupakan cerminan keadaan mampu atau tidaknya penduduk mendapatkan air bersih ditinjau dari sudut ekonomi penduduk sekitarnya maupun tingkat intelektual penduduk. Kesemuanya ini dapat disebabkan oleh kemiskinan secara ekonomis maupun kemiskinan pendidikan sehingga acuh terhadap pemakaian air bersih, atau karena benar-benar disebabkan keadaan kemiskinan alamnya.

Penggunaan pompa/pompa listrik/sumur/perigi sebagai sumber air minum penduduk masih cukup menonjol di desa tertinggal baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, masing-masing mempunyai persentase 67 persen dan 89 persen. Di Kabupaten Gresik dan Kotamadia Surabaya khususnya di kota, sumber air minum penduduk sebagian besar berasal dari PAM. Tetapi ada beberapa kabupaten yang sebagian

besar (> 70 persen) penduduknya masih menggunakan mata air/sungai/danau/ air hujan sebagai sumber air minum, diantaranya yang persentasenya tertinggi adalah Kabupaten Trenggalek (100 persen), Pacitan (98 persen) dan Kabupaten Probolinggo (71 persen).

.6 Angkutan dan Komunikasi.

Jalan merupakan prasarana transportasi yang cukup vital bagi perkembangan desa. Kondisi jalan desa yang baik akan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu desa.

Sebagian besar desa-desa miskin di Jawa Timur keadaan lalu lintas antar desa/kelurahan melalui jalan darat. Tetapi di Kabupaten Sumenep, Sampang dan Bojonegoro masih ada beberapa desa (16 desa) yang lalu lintas antar desa/kelurahan melalui air. Desa-desa tertinggal yang keadaan lalu lintas antar desa melalui darat, 42 persen dari jumlah desa tertinggal tersebut telah menikmati jalan aspal, jalan diperkeras 40 persen dan jalan tanah 18 persen.

Jika dibandingkan antara kota dan pedesaan ternyata kondisi jalan antara ke dua wilayah tersebut menunjukkan suatu perbedaan yang berarti. Di kota, sekitar 3 persen berkondisi jalan tanah dan 20 persen di pedesaan, sedangkan yang berkondisi jalan aspal sebesar 87 persen di kota dan 36 persen di pedesaan (lihat tabel 8A).

Kemudahan angkutan bagi penduduk desa mendorong mobilitas baik untuk kepentingan kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya. Keadaan ini menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk desa bersangkutan. Sebaliknya pada desa-desa yang sulit terjangkau oleh angkutan, pertumbuhan ekonominya

dapat terhambat karena kesulitan angkutan untuk pemasaran hasil produksi maupun kesulitan mendapatkan pemenuhan kebutuhan.

Angkutan umum roda 3/roda 4 yang digunakan oleh penduduk, sudah 85 persen dapat dijumpai di desa-desa Propinsi Jawa Timur. Di kota 97 persen desa ada angkutan umum roda 3/4, pedesaan mencapai 83 persen. Angkutan umum roda 3/4 lebih banyak dijumpai di desa tidak tertinggal (88 persen) daripada di desa tertinggal (74 persen). Untuk angkutan umum yang melalui air, ada 451 desa tidak tertinggal yang penduduknya menggunakan perahu tak bermotor/perahu tempel dan 31 desa menggunakan kapal motor. Angkutan air lebih banyak berada di pedesaan daripada perkotaan. Di desa tertinggal, angkutan air digunakan di 135 desa untuk jenis perahu tak bermotor dan kapal motor digunakan penduduk di 11 desa. Tak berbeda jauh dengan kondisi di desa tidak tertinggal, angkutan air inipun di desa-desa tertinggal lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan.

Pasar berfungsi sebagai tempat pembelian barang kebutuhan penduduk dan berfungsi pula untuk meningkatkan pendapatan masyarakat jika mereka mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya. Keuntungan itu dapat diperoleh apabila tersedia pasar untuk memperdagangkan hasil produksi. Adanya fasilitas pasar yang tetap membuat aktifitas perdagangan lebih lancar. Selain itu pasar sering digunakan sebagai tempat pertukaran informasi positif antar penduduk, baik diantara penduduk setempat maupun dari luar desa.

Berdasarkan tabel 8C desa-desa miskin terutama di pedesaan, dimana lebih dari 20 persen desa tersebut penduduknya mengalami kesulitan untuk menuju ke pasar terdekat. Lain hal di kota, tidak ada satu desapun penduduknya yang mengalami kesulitan untuk menuju ke pasar maupun ke pertokoan terdekat. Dari gambaran tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa banyak desa-desa khususnya desa tertinggal pedesaan di Jawa Timur yang tidak/belum mempunyai sarana pasar.

Sarana komunikasi seperti telepon dan kantor pos merupakan ciri suatu desa maju. Kekurangan sarana komunikasi akan membuat suatu desa ketinggalan informasi yang berguna bagi pembangunan desa.

Desa tertinggal pada umumnya tidak memiliki sarana komunikasi yang memadai. Untuk daerah pedesaan, lebih dari 80 persen desa tidak memiliki sarana komunikasi, seperti telepon/telepon umum (99 persen), kantor pos/kantor pos pembantu (98 persen), surat kabar (97 persen), dan televisi umum 84 persen. Di daerah kota persentasenya relatif lebih kecil, dimana banyaknya desa yang tidak memiliki sarana komunikasi telepon/telepon umum 69 persen, kantor pos/kantor pos pembantu 80 persen, televisi umum 72 persen, sedangkan surat kabar 84 persen.

TABEL 01 : BANYAKNYA DAN PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMPEROLEH IDT 1994/1995 DAN 1995/1996.

PROVINSI : JAWA TIMUR (35)
DAERAH : KOTA + PEDESAAN

	KABUPATEN/ KOTAMADYA	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	1994 / 1995		1995 / 1996	
			JUMLAH (3)	PERSENTASE (%) (4)	JUMLAH (5)	PERSENTASE (%) (6)
01	PACITAN	164	35	21,34	44	26,83
02	PONOROGO	303	108	35,64	2	0,66
03	TRENGGALEK	157	40	25,48	16	10,19
04	TULUNGAGUNG	271	55	20,30	59	21,77
05	BLITAR	248	46	18,55	31	12,50
06	KEDIRI	344	57	16,57	18	5,23
07	MALANG	410	68	16,59	68	16,59
08	LUMAJANG	201	47	23,38	51	25,37
09	JEMBER	242	23	9,50	1	0,41
10	BANYUWANGI	191	10	5,24	2	1,05
11	BONDOWOSO	195	51	26,15	41	21,03
12	SITUBONDO	136	38	27,94	38	27,94
13	PROBOLINGGO	330	94	28,48	60	18,18
14	PASURUAN	365	118	32,33	60	16,44
15	SIDOARJO	353	24	6,80	22	6,23
16	MOJOKERTO	304	49	16,12	49	16,12
17	JOMBANG	306	59	19,28	55	17,97
18	NGANJUK	277	98	35,38	97	35,02
19	MADIUN	206	43	20,87	45	21,84
20	MAGETAN	235	18	7,66	18	7,66
21	NGAWI	217	51	23,50	52	23,96
22	BOJONEGORO	430	145	33,72	129	30,00
23	TUBAN	328	96	29,27	51	15,55
24	LAMONGAN	475	65	13,68	60	12,63
25	GRESIK	357	40	11,20	36	10,08
26	BANGKALAN	281	172	61,21	173	61,57
27	SAMPANG	186	109	58,60	113	60,75
28	PAMEKASAN	189	58	30,69	58	30,69
29	SUMENEP	332	122	36,75	131	39,46
71	KEDIRI	46	7	15,22	3	6,52
72	BLITAR	20	2	10,00	2	10,00
73	MALANG	57	1	1,75	-	-
74	PROBOLINGGO	29	1	3,45	1	3,45
75	PASURUAN	34	3	8,82	-	-
76	MOJOKERTO	18	3	16,67	3	16,67
77	MADIUN	27	2	7,41	2	7,41
78	SURABAYA	163	1	0,61	1	0,61
J U M L A H		8.427	1.959	23,25	1.592	18,89

TABEL 01 : BANYAKNYA DAN PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMPEROLEH IDT 1994/1995 DAN 1995/1996.

PROVINSI : JAWA TIMUR (35)
DAERAH : KOTA

	KABUPATEN/ KOTAMADYA		KABUPATEN/ DESA/ KELURAHAN		KELURAHAN YANG MEMPEROLEH IDT	
	JUMLAH (1)	PERSENTASE (%) (2)	JUMLAH (3)	PERSENTASE (%) (4)	JUMLAH (5)	PERSENTASE (%) (6)
01	PACITAN	4	-	-	-	-
02	PONOROGO	31	11	35,48	-	-
03	TRENGGALEK	6	-	-	-	-
04	TULUNGAGUNG	53	17	32,08	18	33,96
05	BLITAR	31	10	32,26	6	19,35
06	KEDIRI	41	10	24,39	4	9,76
07	MALANG	53	17	13,21	7	13,21
08	LUMAJANG	20	4	20,00	4	20,00
09	JEMBER	30	1	3,33	-	-
10	BANYUWANGI	40	5	12,50	2	5,00
11	BONDOWOSO	12	1	8,33	1	8,33
12	SITUBONDO	24	6	25,00	7	29,17
13	PROBOLINGGO	26	7	26,92	5	19,23
14	PASURUAN	49	13	26,53	5	10,20
15	SIDOARJO	119	23	19,33	21	17,65
16	MOJOKERTO	50	15	30,00	15	30,00
17	JOMBANG	49	12	24,49	11	22,45
18	NGANJUK	40	13	32,50	13	32,50
19	MADIUN	19	6	31,58	6	31,58
20	MAGETAN	19	2	10,53	2	10,53
21	NGAWI	7	2	28,57	2	28,57
22	BOJONEGORO	27	2	7,41	1	3,70
23	TUBAN	25	9	36,00	4	16,00
24	LAMONGAN	24	4	16,67	4	16,67
25	GRESIK	65	9	13,85	9	13,85
26	BANGKALAN	22	9	40,91	9	40,91
27	SAMPANG	11	5	45,45	5	45,45
28	PAMEKASAN	10	1	10,00	1	10,00
29	SUMENEP	20	4	20,00	4	20,00
71	KEDIRI	42	7	16,67	3	7,14
72	BLITAR	18	2	11,11	2	11,11
73	MALANG	50	1	2,00	-	-
74	PROBOLINGGO	16	1	6,25	1	6,25
75	PASURUAN	27	2	7,41	-	-
76	MOJOKERTO	17	3	17,65	3	17,65
77	MADIUN	25	2	8,00	2	8,00
78	SURABAYA	146	1	0,68	1	0,68
J U M L A H		1.268	227	17,90	178	14,04

TABEL 01 : BANYAKNYA DAN PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMPEROLEH IDT 1994/1995 DAN 1995/1996.

PROVINSI : JAWA TIMUR (35)
 DAERAH : PEDESAAN

	JUMLAH DESA/ KELURAHAN			DESA/ KELURAHAN YANG MEMPEROLEH IDT		
	(1)	(2)	(3)	1994 / 1995	1995 / 1996	PERSENTASE (%)
			JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
			(3)	(4)	(5)	(6)
01	PACITAN	160	35	21,88	44	27,50
02	PONOROGO	272	97	35,66	2	0,74
03	TRENGGALEK	151	40	26,49	16	10,60
04	TULUNGAGUNG	218	38	17,43	41	18,81
05	BLITAR	217	36	16,59	25	11,52
06	KEDIRI	303	47	15,51	14	4,62
07	MALANG	357	61	17,09	61	17,09
08	LUMAJANG	181	43	23,76	47	25,97
09	JEMBER	212	22	10,38	1	0,47
10	BANYUWANGI	151	5	3,31	-	-
11	BONDOWOSO	183	50	27,32	40	21,86
12	SITUBONDO	112	32	28,57	31	27,68
13	PROBOLINGGO	304	87	28,62	55	18,09
14	PASURUAN	316	105	33,23	55	17,41
15	SIDOARJO	234	1	0,43	1	0,43
16	MOJOKERTO	254	34	13,39	34	13,39
17	JOMBANG	257	47	18,29	44	17,12
18	NGANJUK	237	85	35,86	84	35,44
19	MADIUN	187	37	19,79	39	20,86
20	MAGETAN	216	16	7,41	16	7,41
21	NGAWI	210	49	23,33	50	23,81
22	BOJONEGORO	403	143	35,48	128	31,76
23	TUBAN	303	87	28,71	47	15,51
24	LAMONGAN	451	61	13,53	56	12,42
25	GRESIK	292	31	10,62	27	9,25
26	BANGKALAN	259	163	62,93	164	63,32
27	SAMPANG	175	104	59,43	108	61,71
28	PAMEKASAN	179	57	31,84	57	31,84
29	SUMENEP	312	118	37,82	127	40,71
71	KEDIRI	4	-	-	-	-
72	BLITAR	2	-	-	-	-
73	MALANG	7	-	-	-	-
74	PROBOLINGGO	13	-	-	-	-
75	PASURUAN	7	1	14,29	-	-
76	MOJOKERTO	1	-	-	-	-
77	MADIUN	2	-	-	-	-
78	SURABAYA	17	-	-	-	-
J U M L A H			7.159	24,19	1.414	19,75

TABEL 02 : BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DIRINCI MENURUT STATUS HUKUM,
STATUS DESA DAN KLASIFIKASI DESA.

PROVINSI : JAWA TIMUR (35) 1995 / 1996 TERTINGGAL
DAERAH : KOTA + PEDESAAN

KABUPATEN/ KOTAMADYA	STATUS HUKUM				STATUS DESA			KLASIFIKASI		
	DEFINITIF/ SK MENDA- GR.I	PERSIAPAN/ SK GUBER- NUR	UPT	LAIN- NYA	DEFINITIF BARU	DESA	KELU- RAHAN	SWA- DAYA	SWA- KARYA	SWA- SEMBA DA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 PACITAN	44	-	-	-	-	44	-	-	-	44
02 PONOROGO	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
03 TRENGGALEK	16	-	-	-	-	16	-	-	-	16
04 TULUNGAGUNG	59	-	-	-	-	56	3	-	1	58
05 BLITAR	31	-	-	-	-	29	2	-	-	31
06 KEDIRI	18	-	-	-	-	18	-	-	-	18
07 MALANG	66	2	-	-	-	67	1	-	6	62
08 LUMAJANG	51	-	-	-	-	51	-	-	-	51
09 JEMBER	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10 BANYUWANGI	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2
11 BONDOWOSO	41	-	-	-	-	41	-	-	1	40
12 SITUBONDO	38	-	-	-	-	38	-	-	-	38
13 PROBOLINGGO	60	-	-	-	-	59	1	-	4	56
14 PASURUAN	57	3	-	-	-	60	-	-	-	60
15 SIDOARJO	22	-	-	-	-	22	-	-	-	22
16 MOJOKERTO	49	-	-	-	-	49	-	-	-	49
17 JOMBANG	55	-	-	-	-	55	-	-	-	55
18 NGANJUK	97	-	-	-	-	97	-	-	-	97
19 MADIUN	45	-	-	-	-	44	1	-	-	45
20 MAGETAN	18	-	-	-	-	17	1	-	-	18
21 NGAWI	52	-	-	-	-	52	-	-	-	52
22 BOJONEGORO	129	-	-	-	-	129	-	-	-	129
23 TUBAN	51	-	-	-	-	51	-	-	-	51
24 LAMONGAN	60	-	-	-	-	60	-	-	-	60
25 GRESIK	36	-	-	-	-	35	1	-	-	36
26 BANGKALAN	173	-	-	-	-	172	1	-	2	171
27 SAMPANG	113	-	-	-	-	112	1	-	8	105
28 PAMEKASAN	58	-	-	-	-	57	1	-	-	58
29 SUMENEP	131	-	-	-	-	131	-	-	5	126
71 KEDIRI	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3
72 BLITAR	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
73 MALANG	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
74 PROBOLINGGO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
75 PASURUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 MOJOKERTO	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3
77 MADIUN	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2
78 SURABAYA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
J U M L A H	1.586	6	-	-	-	1.575	17	-	27	1.565

TABEL 02 : BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DIRINCI MENURUT STATUS HUKUM,
STATUS DESA DAN KLASIFIKASI DESA.

KABUPATEN/ KOTAMADYA	1995 / 1996 TERTINGGAL										
	STATUS HUKUM					STATUS DESA			KLASIFIKASI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROVINSI : JAWA TIMUR (35) DAERAH : KOTA	DEFINITIF/ SK MENDA- GRI	PERSIAPAN/ SK GUBER- NUR	UPT	LAIN- NYA	DEFINITIF BARU	DESA	KELU- RAHAN	SWA- DAYA	SWA- KARYA	SWA- SEMBA DA	
01 PACITAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 PONOROGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03 TRENGGALEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04 TULUNGAGUNG	18	-	-	-	-	16	2	-	-	18	
05 BLITAR	6	-	-	-	-	4	2	-	-	6	
06 KEDIRI	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
07 MALANG	7	-	-	-	-	6	1	-	-	7	
08 LUMAJANG	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
09 JEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 BANYUWANGI	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	
11 BONDOWOSO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
12 SITUBONDO	7	-	-	-	-	7	-	-	-	7	
13 PROBOLINGGO	5	-	-	-	-	5	-	-	-	5	
14 PASURUAN	5	-	-	-	-	5	-	-	-	5	
15 SIDOARJO	21	-	-	-	-	21	-	-	-	21	
16 MOJOKERTO	15	-	-	-	-	15	-	-	-	15	
17 JOMBANG	11	-	-	-	-	11	-	-	-	11	
18 NGANJUK	13	-	-	-	-	13	-	-	-	13	
19 MADIUN	6	-	-	-	-	5	1	-	-	6	
20 MAGETAN	2	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
21 NGAWI	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
22 BOJONEGORO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
23 TUBAN	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
24 LAMONGAN	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
25 GRESIK	9	-	-	-	-	8	1	-	-	9	
26 BANGKALAN	9	-	-	-	-	9	-	-	-	9	
27 SAMPANG	5	-	-	-	-	4	1	-	-	5	
28 PAMEKASAN	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
29 SUMENEP	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	
71 KEDIRI	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	
72 BLITAR	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
73 MALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74 PROBOLINGGO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
75 PASURUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76 MOJOKERTO	3	-	-	-	-	3	-	-	-	3	
77 MADIUN	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
78 SURABAYA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
J U M L A H	177	1	-	-	-	164	14	-	-	178	

TABEL 02 : BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DIRINCI MENURUT STATUS HUKUM,
STATUS DESA DAN KLASIFIKASI DESA.

1995 / 1996 TERTINGGAL

PROPINSI : JAWA TIMUR (35)
DAERAH : PEDESAAN

KABUPATEN/ KOTAMADYA	STATUS HUKUM				STATUS DESA			KLASIFIKASI			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DEFINITIF/ SK MENDA- GRI	PERSIAPAN/ SK GUBER- NUR	UPT	LAIN- NYA	LAIN- NYA	DEFINITIF BARU	DESA	KELU- RAHAN	SWA- DAYA	SWA- KARYA	SWA- SEMBA DA
01 PACITAN	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	44
02 PONOROGO	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
03 TRENGGALEK	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
04 TULUNGAGUNG	41	-	-	-	-	-	40	1	-	1	40
05 BLITAR	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	25
06 KEDIRI	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
07 MALANG	59	2	-	-	-	-	61	-	-	6	55
08 LUMAJANG	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47
09 JEMBER	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
10 BANYUWANGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 BONDOWOSO	40	-	-	-	-	-	40	-	-	1	39
12 SITUBONDO	31	-	-	-	-	-	31	-	-	-	31
13 PROBOLINGGO	55	-	-	-	-	-	54	1	-	4	51
14 PASURUAN	52	3	-	-	-	-	55	-	-	-	55
15 SIDOARJO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
16 MOJOKERTO	34	-	-	-	-	-	34	-	-	-	34
17 JOMBANG	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	44
18 NGANJUK	84	-	-	-	-	-	84	-	-	-	84
19 MADIUN	39	-	-	-	-	-	39	-	-	-	39
20 MAGETAN	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
21 NGAWI	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
22 BOJONEGORO	128	-	-	-	-	-	128	-	-	-	128
23 TUBAN	47	-	-	-	-	-	47	-	-	-	47
24 LAMONGAN	56	-	-	-	-	-	56	-	-	-	56
25 GRESIK	27	-	-	-	-	-	27	-	-	-	27
26 BANGKALAN	164	-	-	-	-	-	163	1	-	2	162
27 SAMPANG	108	-	-	-	-	-	108	-	-	8	100
28 PAMEKASAN	57	-	-	-	-	-	57	-	-	-	57
29 SUMENEP	127	-	-	-	-	-	127	-	-	5	122
71 KEDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72 BLITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 MALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74 PROBOLINGGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 PASURUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 MOJOKERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 MADIUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 SURABAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H	1.409	5	-	-	-	-	1.411	3	-	27	1.387

TABEL 02 : BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DIRINCI MENURUT STATUS HUKUM,
STATUS DESA DAN KLASIFIKASI DESA.

1995 / 1996 TIDAK TERTINGGAL

KABUPATEN/ KOTAMADYA	STATUS HUKUM			STATUS DESA			KLASIFIKASI				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 PACITAN	120	-	-	-	-	-	115	5	-	-	120
02 PONOROGO	301	-	-	-	-	-	270	31	-	-	301
03 TRENGGALEK	141	-	-	-	-	-	136	5	-	-	141
04 TULUNGAGUNG	212	-	-	-	-	-	198	14	-	1	211
05 BLITAR	215	-	2	-	-	-	190	27	-	-	217
06 KEDIRI	326	-	-	-	-	-	325	1	-	-	326
07 MALANG	338	-	4	-	-	-	326	16	10	7	325
08 LUMAJANG	147	-	3	-	-	-	144	6	-	-	150
09 JEMBER	239	-	-	-	2	-	219	22	6	6	229
10 BANYUWANGI	177	-	11	-	1	-	165	24	1	1	187
11 BONDOWOSO	151	-	3	-	-	-	143	11	-	2	152
12 SITUBONDO	97	-	1	-	-	-	94	4	-	-	98
13 PROBOLINGGO	270	-	-	-	-	-	265	5	1	15	254
14 PASURUAN	305	-	-	-	-	-	281	24	-	-	305
15 SIDOARJO	331	-	-	-	-	-	305	26	-	-	331
16 MOJOKERTO	255	-	-	-	-	-	250	5	-	-	255
17 JOMBANG	251	-	-	-	-	-	251	-	-	-	251
18 NGANJUK	180	-	-	-	-	-	171	9	-	-	180
19 MADIUN	161	-	-	-	-	-	154	7	-	-	161
20 MAGETAN	217	-	-	-	-	-	190	27	-	-	217
21 NGAWI	163	-	2	-	-	-	161	4	-	-	165
22 BOJONEGORO	301	-	-	-	-	-	290	11	-	-	301
23 TUBAN	277	-	-	-	-	-	265	12	-	1	276
24 LAMONGAN	415	-	-	-	-	-	402	13	1	1	413
25 GRESIK	321	-	-	-	-	-	296	25	-	-	321
26 BANGKALAN	108	-	-	-	-	-	98	10	1	-	107
27 SAMPANG	73	-	-	-	-	-	68	5	-	7	66
28 PAMEKASAN	131	-	-	-	-	-	121	10	-	-	131
29 SUMENEP	201	-	-	-	-	-	197	4	-	3	198
71 KEDIRI	43	-	-	-	-	-	35	8	-	-	43
72 BLITAR	18	-	-	-	-	-	-	18	-	-	18
73 MALANG	57	-	-	-	-	-	12	45	-	-	57
74 PROBOLINGGO	28	-	-	-	-	-	16	12	-	-	28
75 PASURUAN	34	-	-	-	-	-	15	19	-	-	34
76 MOJOKERTO	15	-	-	-	-	-	3	12	-	-	15
77 MADIUN	25	-	-	-	-	-	5	20	-	-	25
78 SURABAYA	162	-	-	-	-	-	-	162	-	-	162
J U M L A H	6.806	-	26	-	-	3	6.176	659	20	44	6.771

JAWA TIMUR (35)
DAERAH : PEDESAAN

	KOMUNIKASI				SARANA MENERIMA INFORMASI							
	JUMLAH DESA/KELU-RAHAN		TELEPON/UMUM		KANTOR POS/PEMBANTU		TELEVISI UMUM		SURAT KABAR		PELANGGAN MAJALAH	
	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK	ADA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01 PACITAN	160	5	155	24	136	23	137	4	156	143	17	
02 PONOROGO	272	4	268	24	248	58	214	4	268	217	55	
03 TRENGGALEK	151	13	138	15	136	24	127	10	141	131	20	
04 TULUNGAGUNG	218	5	213	11	207	47	171	5	213	194	24	
05 BLITAR	217	16	201	14	203	52	165	9	208	174	43	
06 KEDIRI	303	10	293	9	294	81	222	8	295	272	31	
07 MALANG	357	33	324	47	310	72	285	38	319	259	98	
08 LUMAJANG	181	19	162	12	169	54	127	7	174	146	35	
09 JEMBER	212	45	167	50	162	84	128	28	184	172	40	
10 BANYUWANGI	151	29	122	18	133	69	82	13	138	113	38	
11 BONDOWOSO	183	14	169	17	166	32	151	15	168	160	23	
12 SITUBONDO	112	9	103	14	98	41	71	6	106	90	22	
13 PROBOLINGGO	304	16	288	19	285	58	246	17	287	260	44	
14 PASURUAN	316	23	293	12	300	78	238	12	304	265	44	
15 SIDOARJO	221	13	221	4	230	89	145	15	219	229	51	
16 MOJOKERTO	254	7	247	11	243	59	195	8	246	229	5	
17 JOMBANG	257	10	247	11	246	22	235	12	245	227	30	
18 NGAJUK	237	17	220	11	222	36	201	3	234	222	15	
19 MADIDUN	187	15	172	16	171	94	93	8	179	162	25	
20 MAGETTAN	216	17	199	16	200	87	129	13	203	199	17	
21 NGAWI	210	9	201	23	187	57	153	22	188	199	11	
22 BOJONEGORO	403	18	385	23	371	88	273	28	375	365	38	
23 TUBAN	303	3	300	32	282	30	213	12	291	293	10	
24 LAMONGAN	451	7	444	12	439	66	385	34	417	369	82	
25 GRESIK	292	14	278	6	286	28	264	12	280	166	126	
26 BANGKALAN	259	6	253	12	247	14	245	11	248	230	29	
27 SAMPANG	175	6	169	17	158	24	151	3	172	164	11	
28 PAMEKASAN	179	14	165	13	166	21	158	4	175	170	9	
29 SUMENEP	312	9	303	32	280	33	279	9	303	270	42	
71 KEDIRI	4	1	3	2	2	2	2	1	3	4	-	
72 BLITAR	2	1	1	2	-	1	1	1	2	2	-	
73 MALANG	7	2	5	2	5	4	3	3	4	7	-	
74 PROBOLINGGO	13	5	8	1	12	10	3	-	13	12	1	
75 PASURUAN	7	3	4	1	7	3	4	-	7	5	1	
76 MOJOKERTO	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	
77 MADIDUN	2	1	1	1	1	1	1	-	2	2	-	
78 SURABAYA	17	8	9	2	15	8	9	5	12	17	-	
JUMLAH	7.159	427	6.732	573	6.586	1.550	5.609	379	6.780	6.107	1.052	